

TAJUK RENCANA

Kerawanan Jelang Pilkada

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) memng baru diadakan tanggal 27 November 2024, namun anjang-ancang untuk ke sana sudah banyak dilakukan sekarang. Bahkan banyak pasangan kepala daerah dan wakil sudah pecah Kongsi sehingga pemerintahan sudah tidak efektif.

Menurut laporan data dari KPU, total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Dalam berbagai kesempatan Bawaslu sudah mengingatkan agar masyarakat ikut memantau aksi pelanggaran yang diam-diam sudah masif terjadi. Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), terdapat berbagai jenis pelanggaran yang bisa terjadi (KR 24/6). Ada beberapa jenis pelanggaran yang umum dalam pilkada.

Pelanggaran administratif, antara lain ketidakpatuhan terhadap aturan kampanye, seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Serta penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pilkada.

Hasil kajian pemantau ASN sedikitnya ada lima hal pelanggaran neutralitas yang paling banyak dilakukan ASN. Pertama, ASN melanggar neutralitas karena melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial. Kedua, ASN melanggar netralitas karena mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan ke salah satu calon atau bakal calon peserta pemilu. Ketiga, melakukan foto bersama calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan. Keempat, melakukan pendekatan ke partai politik untuk kepentingan pencalonan dirinya atau orang lain di pemilu atau pilkada hingga menghadiri deklarasi calon peserta pemilu.

Pelanggaran Kampanye hitam (black campaign) yang menyebarkan informasi palsu atau fitnah terhadap lawan politik. Yang masih rutin terjadi dan makin terang-terangan adalah politik uang (money politics),

yaitu memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihan mereka. Intimidasi atau ancaman terhadap pemilih agar memilih atau tidak memilih kandidat tertentu.

Dari sisi regulasi soal netralitas ASN sudah cukup jelas dan memadai untuk menjaga hasrat pemilih terhadap salah satu peserta pemilu. Namun memang dalam praktiknya bukan perkara mudah. Oleh karena itu, kesadaran diri sebagai ASN untuk bersikap netral selalu ditanamkan dan dibarengi juga dengan pencegahan serta pengawasan oleh berbagai pihak terkait.

Pemalsuan dokumen atau identitas pemilih, juga masih bisa terjadi di sejumlah wilayah. Sedang pelanggaran tata tertib dan peraturan Pemilu, misalnya kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Kemudian ada yang melibatkan anak-anak atau menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye.

Pelanggaran-pelanggaran ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tergantung pada tingkat keparahan dan jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut. Penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini penting untuk memastikan bahwa pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis

Pelanggaran dalam Pilkada dapat diatasi melalui beberapa langkah dan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Sengketa yang timbul dari pelanggaran Pilkada dapat diselesaikan melalui proses hukum yang telah diatur. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan terganggu dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menangani tindak pidana Pilkada.

Implementasi norma-norma Pilkada harus dilakukan secara efektif dan optimal. Bawaslu membuat desain serta strategi pengawasan dan penegakan hukum Pilkada yang lebih efektif yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat ikut mengawasi, sehingga Pilkada bisa berjalan transparan untuk memilih pemimpin daerah yang benar-benar mampu. (***)-d

Masih Darurat (Penyalahgunaan) Narkotika?

TEPAT pada Rabu, tanggal 26 Juni 2024 ini, kita kembali memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Mulanya Hari Anti Narkotika Internasional dicanangkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1987 silam melalui Resolusi 42/112 untuk memperkuat aksi serta kolaborasi global dalam ihwal melawan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perdagangan gelap narkotika.

Hari Anti Narkotika Internasional yang rutin diperingati saban tahun tersebut sejatinya merupakan konfigurasi dari keprihatinan dunia terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika nan begitu real berimpak buruk terhadap kesehatan, perkembangan sosial ekonomi, keamanan serta kedamaian mondial. Selain itu, diperingatinya Hari Anti Narkotika Internasional dimaksudkan agar mayapada ini lekas mencapai buana yang bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Setiap tahun, PBB menetapkan tema khusus untuk memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Tema-tema tersebut lazimnya berfokus pada berbagai aspek dari masalah narkotika, seperti pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum, dan dukungan kepada korban penyalahgunaan narkotika. Via tema-tema itulah, PBB berupaya menarik atensi masyarakat global dan menstimulasi partisipasi aktif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta individu dalam memerangi problematika narkotika.

Adapun tema Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 yang dirilis oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* adalah *"Taking a People-Centered Approach to Drug Policies"* (Mengambil Pendekatan Berpusat pada Manusia dalam Kebijakan Narkotika). Tema ini mengaksentuasikan signifikansi perlakuan kepada pengguna narkotika dengan respek dan empati, menyediakan layanan berbasis bukti secara sukarela pada semua, menawarkan alternatif untuk hukuman, mengutamakan pencegahan, serta memimpin dengan belas kasih. Kampanye tersebut bertujuan guna mereduksi stigma dan diskriminasi terhadap pengguna narkotika de-

Yulianta Saputra

ngan mempromosikan bahasa jua sikap hormat serta tak menghakimi.

Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, Hari Anti Narkotika Internasional juga memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: meningkatkan kesadaran khalayak tentang bahaya narkotika, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pen-



ada 1.184 kasus dengan jumlah ter-sangka sebanyak 1.483 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan total ter-sangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Kemudian di tahun 2023, meskipun ada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1,95 persen pada tahun 2022 menjadi 1,75 persen pada tahun 2023, *walakin* masih dalam kategori tinggi kuantitas penyalahgunaan narkotika dengan mengungkap 910 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika dengan mengamankan sebanyak 1.284 tersangka,

Dengan keterangan yang masih begitu ironis tersebut, Hari Anti Narkotika Internasional mestinya menjadi momentum krusial untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta memperkuat komitmen dalam memeranginya. Dalam konteks di Ibu Pertiwi, peringatan tersebut tentunya bukan sekadar seremonial belaka, melainkan pula merupakan momen penting untuk mengajak seantero anasir-anasir dalam masyarakat bersatu padu dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dengan pendekatan yang holis-tis serta kerja sama nan kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelbagai *stakeholder* terkait, negeri ini kapabel menciptakan generasi sehat, produktif juga bebas dari narkotika. Demi kesejahteraan juga kemajuan bangsa, mari kita bersama-sama menjadi proporsi dan turut berkontribusi mengejawantahkan masa depan nir-narkotika! (*)

***Yulianta Saputra SH MH,**
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum FSH
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi, **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH.
Direktur Umum: Yurisa Nugroho Samawi SE MM MSc.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakil. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Taba Harjaja.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyuwangi : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karanglesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Peran Media Massa pada Pengusutan Kasus Vina

TRAGEDI pembunuhan yang menewaskan sepasang kekasih pada 2017 silam hingga kini belum menemukan titik terang. Kasus Vina Cirebon menjadi sorotan di berbagai lapisan masyarakat dan media. Insiden yang menimpa Vina dan kekasihnya itu semakin menjadi perhatian publik tatkala teman Vina menjadi mediator ruh Vina atau sering disebut kesurupan. Sontak pengakuan-pengakuan kejadian pada malam itu terurai bak benang kusut yang terurai. Lantas pihak kepolisian menemukan titik terang dalam mengusut pelaku di balik hilangnya dua nyawa. Sayangnya proses pengusutan kasus ini terhenti hingga muncul kembali pada tahun 2024 ini.

Bukan suatu kasus kecil, namun terjadi dalam waktu yang cukup panjang. Tentu ini menjadi polemik masyarakat. Kasus ini turut menyita perhatian sutradara film di Indonesia, yakni Anggi Umbara. Deretan peristiwa sebelum terjadi hingga tragedi mengensakan itu dikemas dalam film yang berjudul "Vina: Sebelum 7 Hari" yang dirilis pada bulan Mei 2024 lalu. Sempat menuai pro dan kontra akan produksi film ini, namun nyatanya menjadi pintu pembuka pengusutan kembali kasus yang sempat tenggelam dari sorotan publik.

Dalam hal ini media menjadi sarana krusial dalam mengawal dan menyoroti pengusutan kasus yang menimpa gadis Cirebon itu. Tak sedikit spekulasi bermunculan mewarnai media sosial, media online hingga media cetak. Informasi yang timbul tentu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap alur kasus ini dan turut mempengaruhi proses penyelidikan.

Peran Media

Mendefinisikan masalah pada kasus ini, pbingkai media dari alur peristiwa sebagai tindak kekerasan dan pelanggaran etika, secara tidak langsung menciptakan emosional tersendiri di masyarakat. Hampir setiap media massa memfokuskan kejadian ini menjadi topik pemberitaan, sehingga membantu menciptakan rasa urgensi

Ika Zahara Adibah

atau pentingnya kasus ini. Penekanan kasus menjadi topik utama juga menekan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Keresahan-keresahan publik turut menghiasi laman media massa.

Peliputan media dari tersangka dan motif yang melatarbelakanginya juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Berada di negara yang demokratis tentu keputusan dan suara rakyat terbanyak turut menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Sama halnya dengan kasus ini, yang diusung oleh media-media dan penikmat media.

Media mempengaruhi persepsi publik tentang perasaan bersalah atau tidak bersalah pada pelaku sehingga pada masanya mempengaruhi arah penyelidikan. Pihak berwenang pun turut merasa diperhatikan oleh publik akan jalannya pengusutan kasus dan memastikan bahwa kasus ini segera menemukan titik terang dan keadilan-nya.

Untuk diketahui, permasalahan pada kasus ini terbilang cukup kompleks. Karena jumlah pelaku yang tidak hanya satu. Terlebih beberapa pelaku menghilangkan jejak dari khalayak. Eksistensi media sangat dibutuhkan dalam taraf ini, tak hanya dalam membentuk opini publik tetapi turut berinvestigasi. Secara tidak langsung media turut memberikan citra kepada khalayak untuk menyoroti apabila terjadi "keusilan" dari pihak berwenang. Nyatanya dalam berjalannya waktu, pihak berwenang sempat mengalami kesalahan fatal yakni salah menangkap pelaku kekerasan. Tentu ini me-

mancing emosional khalayak. Media turut menjadi jembatan bagi publik untuk meneropong setiap langkah dari pihak berwenang.

Dalam jejaring sosial media yang terdiri dari beberapa platform, turut menyuarakan aksi keadilan untuk kasus tragis ini. Hal tersebut merupakan perwujudan dari keberhasilan media dalam membentuk opini publik. Sayangnya dari keaktifan media ini dapat membentuk opini dari keluarga korban.

Kemungkinan yang terjadi adalah traumatis yang berkelanjutan dari keluarga, yang mana korban adalah gadis yang dicintai di keluarganya. Dampak emosional kepada keluarga Vina biasanya tunduk pada wawancara yang berulang, pengawasan dan pelaporan yang meluas. Mengingat pengusutan kasus ini sempat tak terlihat publik. Media memberikan perannya dalam proses pengusutan kasus Vina dengan salah satu teori media massa, yaitu teori agenda setting. Yang mana media turut membentuk opini publik. (*)

***Ika Zahara Adibah, Mahasiswi**
Prodi Komunikasi dan Penyiaran
Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Suka Yogyakarta.

Pojok KR

- Timbunan sampah Kota Yogya capai 5.000 ton.
- **Persoalan klasik yang tak pernah selesai, siapapun walikotanya.**
- ***
- Pilkada, tak boleh tergiur politik uang.
- **Realitasnya, tak seindah aturan.**
- ***
- Program makan bergizi gratis masuk RAPBN 2025.
- **Yang penting tepat sasaran.**